

# **DINAMIKA KONFLIK ETNIS DAN AGAMA DI LIMA WILAYAH KONFLIK INDONESIA**

**Rusmin Tumanggor**

**Jaenal Aripin dan Imam Soeyoeti**

## **ABSTRAK**

Selama berabad-abad sampai masa Orde Baru, suku bangsa dan penganut agama di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat, sepertinya ikut mengusik kerukunan. Hal ini ditandai dengan munculnya konflik horizontal yang melibatkan agama dan suku/etnis di beberapa wilayah Indonesia, seperti; Kalimantan Barat dan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Selatan dan Utara, serta daerah-daerah lainnya. Solusi melalui temu lintas tokoh masyarakat serta bantuan pihak keamanan pun telah di upayakan, tetapi di celah itu, kembali bergolak; itulah sebabnya dilaksanakan terhadap daerah rusuh, guna memberi informasi berupa data konflik dan konsep modal kedamaian sosial, kerukunan hidup dari berbagai etnis dan agama, serta pelapisan masyarakat.

Focus penelitian ini adalah untuk menjaring konsepsi berbagai etnis, agama, dan pelapisan masyarakat tentang konflik dan kedamaian, termasuk konsepsi mereka tentang hak dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai payung bagi seluruh etnis, agama, dan pelapisan masyarakat. Hal ini berdasarkan hipotesis bahwa; "kerusuhan di berbagai wilayah tanah air dalam persepsi berbagai etnis, agama, dan pelapisan masyarakat berhubungan dengan kesenjangan sosial ekonomi, keagamaan, perilaku antaretnis, kurangnya peran lembaga sosial pemerintah, keberpihakan aparat dalam menyelesaikan kerusuhan, di sisi lain keikutsertaan mereka memicu kerusuhan itu'. Untuk menguji hipotesis ini, teori yang digunakan adalah; teori fungsional Talcott Parsons, teori konflik Dahrendrof kebalikan teori kohesi Malinowski, dan teori kebudayaan dominant Parsudi Suparlan. Sedangkan metode penelitian yang di gunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, dengan instrument kuesioner dan wawancara mendalam.

### **A. Pendahuluan**

Selama berabad-abad, suku-suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Falsafat Pancasila yang bertumpu pada agama lewat Ketuhanan Yang Maha Esa memberi konsep kedamaian abadi. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubangsaan, agama, pelapisan masyarakat sepertinya ikut mengusik kerukunan itu, seolah-olah menyimbolkan kemerdekaan dari depresi yang mendalam. Ibarat panas setahun dihapuskan hujan sehari. Semacam muncul stimulus perubah kepribadian pelbagai pihak dalam waktu sekejap.

Setidak-tidaknya menjadi senjata bagi lintas kepentingan para pihak yang berseteru kekuasaan, aset dan pengaruh. Jakarta sebagai sentra pemerintahan serta cermin bagi propinsi-propinsi di daerah tidak juga luput dari gejolak konflik, seperti tauran di Matraman; Bukit Duri; Johar Baru; Keramat Tunggak dan Glodok. Keterkoyakan kenyamanan seperti pemboman rumah-rumah ibadah, lembaga

pendidikan hingga hotel-hotel dan tempat-tempat hiburan. Hal seperti ini terlihat pula pada bilangan kawasan di wilayah Indonesia, seperti kerusuhan di Jawa Timur; Kalimantan Barat dan Tengah; Sulawesi Tengah; Maluku Selatan dan Utara; Papua; Bali; dll.

Pelbagai penelitianpun telah digelar peneliti setempat maupun Pusat, solusi melalui temu lintas tokoh warga serta bantuan pihak keamanan meminta kesadaran bermasyarakat dan bernegara juga dikemas tetapi dicelah itu kembali bergolak.

Itulah sebabnya perlu dikaji ulang tentang idea dan realitas kehidupan di ibu kota, dan daerah-daerah rusuh untuk memperoleh informasi berupa data konflik hingga konsep modal kedamaian sosial, kerukunan hidup dari berbagai etnis, agama serta pelapisan masyarakat yang berdomisili di kawasan rentan tersebut. Begitu pula dijaring data kawasan komunitas kebal atau resisten terhadap konflik yang masih bisa mengenyam kesejukan di tengah kemelut lokasi jiran, sehingga kondisi ini menjadi sumber pertimbangan pendekatan yang seharusnya diadopsi berbagai etnis, agama serta pelapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitiannya adalah; “Selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru (*The New Order Regime*) dan jauh ke belakang sejak zaman penjajahan, keutuhan warga umumnya nampak kokoh. Akan tetapi seputar masa reformasi muncul eskalasi kerusuhan di berbagai wilayah yang terkesan ada hubungan dengan disorganisasi lintas etnis, agama dan pelapisan sosial”. Atas permasalahan tersebut, pertanyaan utama penelitian ini adalah: “Apa matarantai penyebab krisis pemerintahan itu memunculkan berbagai bentuk kerusuhan antar etnis, agama dan pelapisan sosial?”.

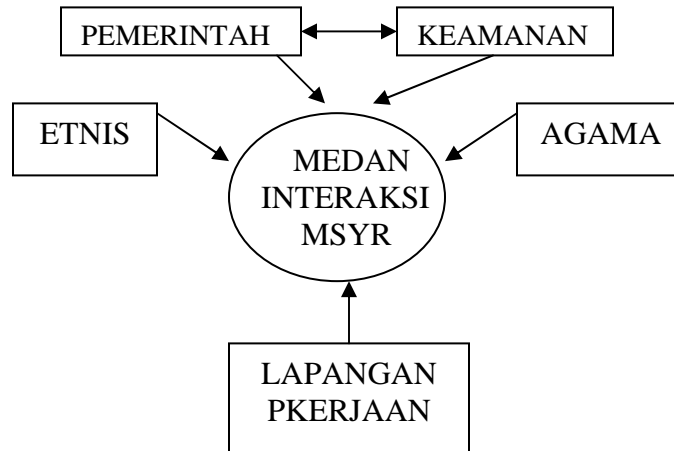
Fokus penelitian ini adalah untuk menjaring konsepsi berbagai etnis, agama dan pelapisan sosial tentang konflik, kedamaian menuju keutuhan sehingga masa yang akan datang mereka tetap mau memelihara kerukunan hidup. Termasuk konsepsi mereka tentang hak dan kewajiban pemerintah dan keamanan dalam menjalankan fungsinya di negara sebagai payung bagi seluruh etnis, agama dan pelapisan sosial.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk; *pertama*, menyumbangkan kajian akademis berupa ilmu pengetahuan tentang paradigma, konsep, proposisi dan teoritis tentang kesukubangsaan: Keutuhan dan kerusuhan sosial di Indonesia; *kedua*, menyajikan berbagai realitas kehidupan dalam kesukubangsaan untuk kepentingan terapan berupa pengambilan kebijakan tentang kedamaian. Signifikansinya adalah; *pertama*, hasil penelitian ini menjadi sumbangan berarti bagi pengembangan teori-teori sosiologi, antropologi, teologi, hukum dan ekonomi, khususnya wilayah kajian lintas etnis dan agama masyarakat Indonesia umumnya. Sehingga melahirkan penelitian perluasan, ulang atau uji coba berupa *action research*; *kedua*, hasil ini masukan bagi pihak Pemerintah c.q. Departemen Sosial, keamanan, politisi dan lembaga swadaya masyarakat, dalam penerbitan keputusan, pemasokan bantuan, penggunaan komunikasi, strategi sekuritas atas semua kebutuhan dan perangkat-perangkat kehidupan damai berbangsa dan bernegara.

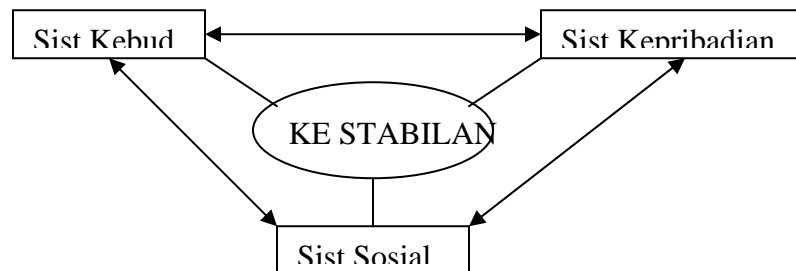
Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah: “Kerusuhan di berbagai kawasan di wilayah tanah air dalam persepsi berbagai etnis dan agama serta pelapisan masyarakat berhubungan dengan kesenjangan sosial ekonomi, sosial keagamaan, perilaku antar etnis, kurangnya peran lembaga pelayanan sosial pemerintah, keberpihakan aparat pemerintah dengan pihak keamanan dalam penyelesaian

kerusuhan masyarakat dan di sisi lain keikutsertaan mereka memicu kerusuhan itu. Dengan proposisi hipotesisnya, semakin terorganisir pengemasan isu negatif keetnisan, agama dan lapangan pekerjaan, terakumulasi dengan kelemahan penanganan pihak pemerintah dan keamanan dalam medan interaksi warga semakin cepat menyulut kerusuhan di komunitas bersangkutan”.

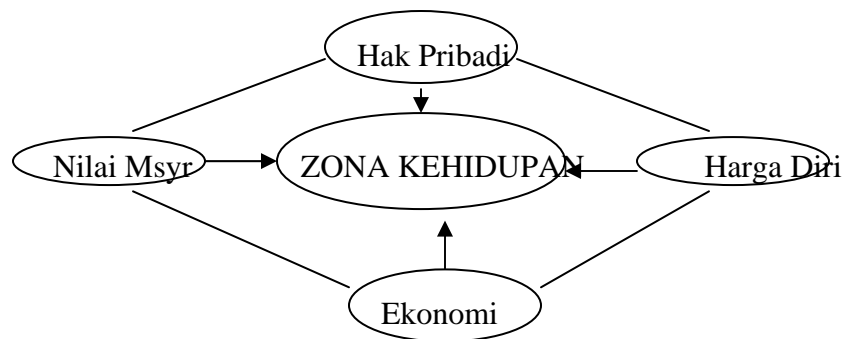
Jika diskemakan terlihat sbb:



Teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah teori fungsional Talcot Parson: “Tertib sosial ditentukan hubungan timbal balik antara sistem-sistem kebudayaan, sosial dan kepribadian”. Jika diskemakan korelasi itu terlihat sbb:



Teori Dahrendorf menyatakan konflik sebagai kegalauan yang bersumber dari ketidakserasian esensi bermacam komponen kehidupan. Kebalikannya adalah teori kohesi dari Malinowski: “Keutuhan akan terjadi bila satu wilayah kehidupan dilandasi secara kuat oleh keuntungan timbal balik ‘reciprocity’ dibawah prinsip-prinsip legal”. Jika diskemakan konsep-konsep pendukung kohesi itu akan nampak sebagai berikut:



Untuk dapat mewujudkan pengelolaan konflik yang baik, menurut Yash Ghai, Profesor Hukum Publik Universitas Hongkong ada prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh segenap komponen masyarakat yang bertikai. Yaitu kepemimpinan yang berwawasan kedepan dan keinginan kuat segenap komponen masyarakat untuk menyudahi dan konflik yang terjadi. Tanpa dua hal tersebut, penanganan konflik akan menjadi persoalan yang berlarut-larut. Keinginan masyarakat untuk menyudahi konflik, dapat dilihat dari berbagai indikator variabel modal sosial yang meliputi kesediaan mereka untuk saling mengerti, tolong menolong, menghormati hak orang lainnya, menerima perbedaan dan pluralitas serta kesediaan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sosialnya. Namun teori ini juga memiliki kelemahan, tidak membicarakan kelambanan dan kemiskinan perangkat antisipasi atas pengaruh luar terhadap zona leadership negara dan masyarakat serta sanksi hukum atas pelanggaran yang jadi penyebab dan akibat kerusakan.

Selanjutnya Teori kebudayaan dominan dari Edwar Bruner diketengahkan Parsudi Suparlan: "Kemampuan penyesuaian terhadap kebudayaan yang telah mapan".

Jika diskemakan akan terlihat sbb:

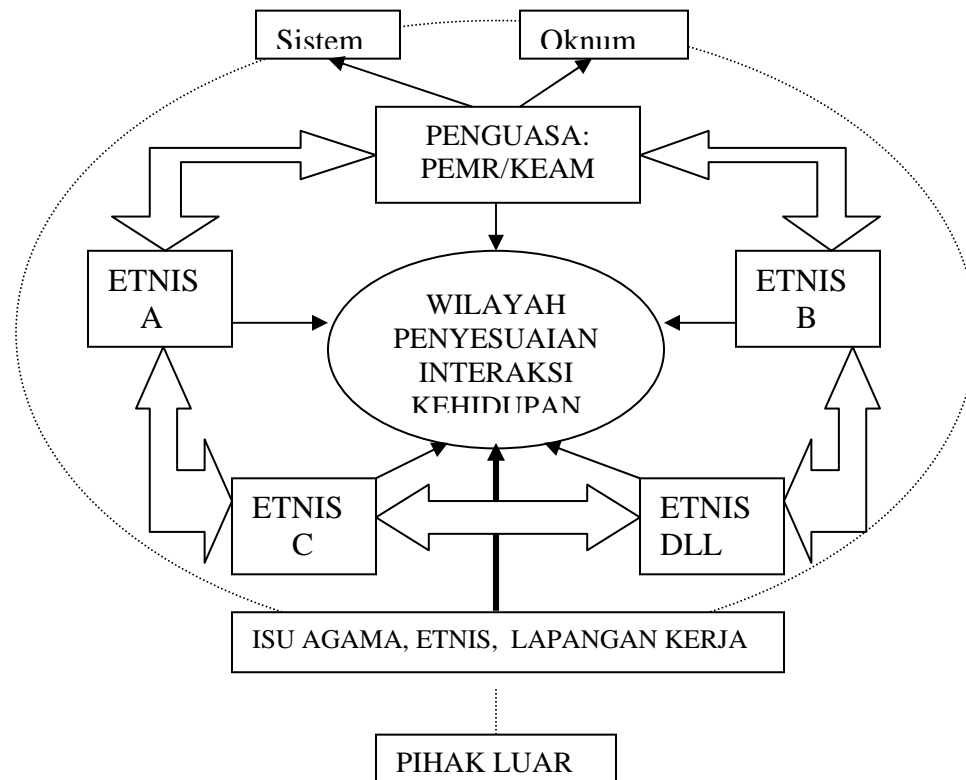


Sebagai catatan, konsep-konsep, proposisi serta teori Suparlan ini lebih terfokus pada analisis interrelasi diantara dua pihak dalam satu lingkungan, hingga pemerintah, sementara kerusakan terkadang terkait dengan pihak luar wilayah Indonesia.

Meletusnya konflik bernuansa etnis dan atau agama di beberapa wilayah secara hampir bersamaan memunculkan banyak hipotesis dan teori. Berbagai hipotesis dan teori tersebut dibangun dengan sebuah harapan besar agar masyarakat dan para pengambil kebijakan dapat lebih memahami berbagai dimensi yang melatari terjadinya konflik. David Bloomfield dan Ben Reilly, setelah melakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam atas berbagai konflik horisontal yang terjadi di negara-negara dunia ketiga menyimpulkan, adanya dua elemen kuat yang seringkali bergabung dan menjadi pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Pertama adalah elemen *identitas*, yaitu mobilisasi orang dalam kelompok-kelompok identitas

komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa dan seterusnya. Kedua adalah elemen *distribusi*, yakni cara untuk membagi sumberdaya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat. Teori ini lebih fokus pada proses migrasi dan peluang, kurang menyentuh intervensi luar dan *pressure group* atau *personal*.

Jika diskemakan konsep-konsep, proposisi-proposisi dan teori-teori di atas ke dalam bentuk kerangka konseptual akan terlihat sbb:



Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan di kawasan rusuh maupun yang aman mulai dan sesudah Mei 1998 serta menganalisa kondisi dan kontribusi Pemerintah Pusat ke Daerah dalam hal tersebut.

Data yang dicari meliputi pendapat, kesaksian, dokumen, tulisan tentang etnis serta agama masyarakat pembauran lintas etnis dan agama tersebut. Dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam, sementara dokumen dan tulisan tentang etnis dilakukan dengan observasi dan analisa kritis.

Informan terdiri dari tokoh-tokoh adat, pemuka agama, cerdik pandai, warga masyarakat biasa, pemda setempat, pihak keamanan, pengurus pemuda di samping organisasi berbagai etnis dan agama yang ada di kawasan tersebut. Seluruhnya berjumlah 50 orang

Adapun wilayah-wilayah yang diteliti adalah Kawasan Rusuh dan Damai Sampit; Kawasan Rusuh dan damai Sambas; Kawasan Rusuh dan damai Poso; Kawasan Rusuh dan damai Ternate. Khusus dari kedua kawasan yang berbeda keamanannya ini diupayakan kiat kunci *world view* masing-masing sehingga terjawab sumber konflik dan sebaliknya modal kedamaian sosial di kawasan itu. Data dikumpul lewat kuesioner dan didukung *interview* terhadap 400 responden yang akhirnya mengembalikan jawaban sebanyak 382 orang.

Data yang dikumpulkan meliputi data esensi dan substantif. Karena itu pendekatan datanya adalah kualitatif. Namun demikian diawali dengan pengumpulan data kuantitatif untuk mendapatkan data jaringan fenomena yang saling terkait serta memudahkan secara sistematis melacak data kualitatif. Pendekatan sumber datanya adalah *emic* (Idea yang tumbuh dari pendukung kehidupan etnis serta agama yang hidup di kawasan itu). Adapun *etic* (pemikiran analisa kritis akademisi dan cendekiawan) hanya akan digunakan pada tingkat kajian teoritis dan model implementasi.

## **B. Deskripsi Wilayah Setting Penelitian**

Penelitian ini diadakan di lima wilayah, yakni; Sambas (Kalimantan Barat), Sampit (Kalimantan Tengah), Poso (Sulawesi Tengah), Ambon (Maluku Selatan ), dan Ternate (Maluku Utara).

### **1. Sambas**

Kabupaten Sambas dengan Ibukota Sambas, merupakan kabupaten hasil pemekaran tahun 1999, dengan jumlah penduduk pada tahun 2001 sebanyak 458.291 jiwa, tersebar dalam 11 kecamatan, dengan rincian laki-laki 228.284 jiwa dan perempuan 230.007 jiwa. Kabupaten Sambas, didiami oleh lima suku bangsa , yakni Melayu 442.470 jiwa, Cina 168.773 jiwa, Dayak 119.380 jiwa, Madura 38.150, dan Jawa 30.420 jiwa. Sektor pertanian masih mendominasi pekerjaan penduduknya, yaitu 74 %, kemudian menyusul sektor perdagangan, industri, dan jasa.

Penduduk Sambas, sebagian besar menganut agama Islam, terutama suku Melayu, sedangkan yang beragama Katholik dan Protestan adalah suku Dayak, kendati suku Dayak aslinya beragama Kaharingan (semacam animisme, kepercayaan kepada roh leluhur yang memiliki kekuatan magis). Prototipe agama kemudian mengidentikkan Melayu dengan Islam, sedangkan Dayak dengan Kristen. Sedangkan Cina, kebanyakan masih menjalankan tradisi nenek moyang. Para pendatang, terutama Jawa dan Madura menganut agama Islam, dan bahkan Madura memiliki tradisi keislaman yang lebih eksklusif dibandingkan dengan penduduk setempat, seperti membuat madrasah sendiri, dan patuh kepada ustadz yang dari etnis Madura. Untuk sarana Ibadah, Masjid ada 506 buah, gereja Protestan 45 buah, gereja Katolik 31 buah. *World view* Melayu antara lain “*Seudik serangkuh dayung, dimane bumi diinjak di situ langit dijunjung, dimane ranting di patah disitu air disauh dan lain lubuk lain ikannya*”. Ungkapan ini menuntut setiap orang memahami lingkungan yang didatanginya dan menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Sementara *world view* Dayak antara lain “*Ngelakin Lejau Te’ ‘aang sa ang te’ ‘aang liray*”. Ini bermakna perlu saling membimbing agar berusaha berprestasi untuk menjadi yang unggul diantara sesama.

### **2. Sampit**

Luas wilayah Kota Sampit --ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur—adalah 50.700 Km<sup>2</sup>, terdiri atas 26 Kecamatan dan 362 Desa/Kelurahan. Didiami oleh 485.200 jiwa, dengan rincian, laki-laki 252.120 jiwa, dan perempuan 232.100 jiwa.

Jumlah penduduk terbesar berada di wilayah Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, yaitu 69.140 jiwa, dan terkecil berada di wilayah Kecamatan Mendawai 5.803 jiwa. Mayoritas penduduk, 86.358 jiwa, bermata pencaharian petani, selebihnya adalah, pedagang, industri, dan jasa.

Dari jumlah penduduk Sambas tersebut, diperkirakan terdapat etnis Madura sebesar 75.000 jiwa, di luar itu, suku asli yakni Dayak menjadi mayoritas, dan selebihnya adalah suku Banjar, Cina dan sedikit berasal dari suku Jawa dan pendatang lainnya. Dilihat dari sisi agama, Islam menjadi anutan mayoritas penduduk dengan jumlah 388.653 jiwa (80 %), Kaharingan, 58.042 jiwa, Kristen Protestan 30.369 jiwa, Budha 1.233 jiwa, Katolik 673 jiwa, dan lainnya 150 jiwa. *World view* masyarakat Banjar adalah ” *Waja sampai ka putting, olah babaya*”. Yaitu bekerja sampai tuntas dan bahu membahu maju bersama. Dengan demikian sifat kerjasama dituntut dalam budaya masyarakat ini.

### **3. Poso**

Poso merupakan salah satu Kabupaten dari 8 daerah Tingkat II Propinsi Sulawesi Tengah, dengan luas wilayah sekitar 14.433,77 Km<sup>2</sup>, terdiri atas 13 Kecamatan, 211 desa, dan 29 kelurahan. Pada tahun 2002, penduduk Kabupaten Poso berjumlah 231.898 jiwa, dengan 64.210 Kepala Keluarga. Kabupaten Poso mempunyai penduduk yang sangat beragam. Beberapa suku asli mendiami kawasan ini, antara lain suku Pamona, Lore, Mori, Bungku, dan Tojo/Una-una. Suku-suku pendatang dalam jumlah besar berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis, Makasar, dan Toraja) dan Sulawesi Utara (Gorontalo dan Minahasa), di samping puluhan ribu pendatang yang secara terencana didatangkan Pemerintah melalui program transmigrasi dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Di kalangan suku-suku asli, orang Pamona, Lore, dan Mori dikenal sebagai penganut agama Kristen (umumnya Protestan). Semenara orang Ampana dan Tojo/Una-una dikenal sebagai penganut Islam. Kaum pendatang, Bugis/Makasar dan Gorontalo dan transmigran dari Jawa dan sebagian Nusa Tenggara adalah penganut Islam. Sementara penganut Kristen di kalangan Kristen berasal dari Toraja dan Minahasa, dan dikalangan transmigran dari sebagian Nusa Tenggara dan Jawa. *World viiew* suku bangsa Bugis menekankan ” *Rebba Sipatokkang Mali Si Parappe, Malilu Si Pakainge*”. Maknanya, jatuh saling angkat , hidup saling memuliakan, lupa saling mengingatkan. Sementara *world view* suku-suku bangsa di Sulawesi Tengah ” *Roso, Risi, Rasa, Nosimpotobe*”. Hendaklah kekuatan kita mempertebal rasa sayang untuk saling menopang. Sementara *world view* suku-suku bangsa dari Manado menekankan ” *Sitou Timou Tumou Tou*” yakni saling menyokong demi saling menadaikan.

### **4. Ambon**

Ambon merupakan salah satu kabupaten dari Propinsi Maluku. Secara keseluruhan, luasnya hanya 761 Km<sup>2</sup>, dihuni oleh kurang lebih 1.200.067 jiwa. Mayoritas penduduknya yakni 47,46 % adalah petani, disusul kemudian pedagang

20.12 %, selebihnya adalah industri dan bekerja pada sektor lain. Rata-rata penduduk Ambon berasal dari pendatang dari berbagai daerah dan suku. Suku-suku yang mendiami Ambon diantaranya, Wattimena, Lokollo, Kakisina, Korputty, Kakerissa, Riupassa, Anakotta, Payapo, Pasireron, Manuputty, Pasal, Pasanea, Kiry, Killian, Tamaela, Simataw, Sitania, Mahusa, Halatu, Tauran, Wattimuri, Lasamahu, Sautsa, Lessy, dan lainnya. Pendatang lain yang cukup banyak adalah dari Buton, Bugis, dan Makasar.

Jika dilihat dari komposisi pemeluk agama, Maluku, khususnya Ambon adalah wilayah dengan tingkat heteroginitas pemeluk agama yang tinggi. Pemeluk Islam dan Kristen (Protestan) mempunyai proporsi yang berimbang, yakni 43,81 % dan 49,44 %. Sementara Katolik hanya 6,25 %, Hindu 0,15 %, dan Budha 0,45%. Adapun *world view* masyarakat Ambon “*Gandongge mari beta, Gendong ose Jua. Lawa mena Haulala*” yang berarti “saudara marilah pelukmu jua. Maju terus pantang mundur”. Ada juga “*Pela Gandong*” (Saling gotong royong).

## 5. Ternate

Ternate adalah ibukota Propinsi Maluku Utara yang baru dibentuk pada tahun 1999. Pada awal pembentukan, hanya memiliki 2 Kabupaten, 1 Kotamadya, 18 kecamatan, dan 529 desa/kelurahan. Luas wilayah Maluku Utara adalah 140.255,36 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan dan perairan. Secara keseluruhan, penduduknya berjumlah 863.261 jiwa. Meskipun wilayahnya lebih besar lautan, akan tetapi mayoritas penduduknya adalah petani.

Bila dilihat dari komposisi agama, pemeluk Islam merupakan mayoritas, yakni 83,7 %, Kristen Protestan 16 %, dan Katolik hanya 2 %. Sedangkan pemeluk agama lain, Budha dan Hindu hanya sedikit sekali, di bawah 1 %. Penduduk Maluku Utara berasal dari kurang lebih 28 suku bangsa, antara lain; Tobaru, Wayoli, Tobelo, Galela, Sahu, Modole, Togutil, Sawai, Buli, Bajo, Ternate, Kao, Malifut, dan lain-lain. Kesemuanya itu, terkonsentrasi pada 3 wilayah kultur, yakni; Wilayah kultur Ternate meliputi Ternate, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula. Wilayah kultur Tidore meliputi kepulauan Tidore, Halmahera Tengah dan Timur. Wilayah kultur Bacan meliputi kepulauan Bacan dan Obi. *World view* masyarakat Maluku Utara ini adalah *Marimoi Ngonefututui* yang berarti “Bersatu Kita Teguh”.

Di lihat dari berbagai *world view* di atas, semua suku-suku bangsa di daerah akan bisa menerima siapa saja asalkan mengikuti pandangan hidup masing-masing suku bangsa. Hal yang perlu dicermati adalah aspek apa saja jenis guncangan pada *world view* tersebut dari lintas kehidupan masyarakat.

## C. Temuan Penelitian

### 1. Sajian Data

#### a). Latar Belakang dan Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik yang terjadi di Sampit, Sambas, Ambon, Poso dan Ternate meskipun masing-masing mempunyai *constraint* yang berbeda namun secara umum dapat dilihat dengan menggunakan kacamata Bloomfield dan Reilly yang telah disebutkan

terdahulu. Yaitu bahwa pada umumnya konflik di kelima wilayah itu terjadi akibat distribusi baik ekonomi, sosial dan politik yang dianggap tidak adil bertepatan dengan perbedaan identitas. Konflik Sampit dan Sambas misalnya, banyak dipicu oleh kenyataan bahwa etnis Madura pada taraf tertentu telah menjelma menjadi kelompok yang berhasil menguasai berbagai sumberdaya ekonomi, sementara disisi lain perilaku sosial mereka yang cenderung eksklusif semakin menegaskan komunalitas etnisnya. Maka ketika terjadi gesekan-gesekan sosial, meskipun itu kecil, dengan etnis Dayak atau Melayu sebagai penduduk asli cukup untuk menyulut sebuah konflik yang massif dan berkepanjangan. Demikian pula halnya yang terjadi di Ambon, Poso dan Ternate dengan isu identitas yang sedikit berbeda (yakni, isu agama dan pada beberapa kasus di Ambon juga dibalut dengan isu etnis, yaitu Buton, Bugis, Makasar dengan penduduk asli).

Data yang berhasil dihimpun peneliti menguatkan tesis diatas, dimana menurut responden, umumnya konflik yang terjadi sangat kuat dipengaruhi oleh isu identitas (etnis dan agama) dan isu distribusi. Sebesar 26,4% responden di lima wilayah konflik menyatakan bahwa penyebab konflik dan keretakan hubungan antar warga adalah karena perbuatan atau sikap kelompok identitas (etnis/agama) tertentu yang menyinggung harga diri dan rasa keadilan kelompok identitas (etnis/agama) lainnya. Penghinaan atas keyakinan (agama) dan suku tertentu juga menjadi penyebab konflik yang cukup dominan, terlihat dari jawaban responden sebesar 19,4 % dan 16,5%. Sementara itu, penguasaan lapangan pekerjaan juga turut menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik, sebesar 15,6%.

Dalam kenyataan di lapangan, faktor-faktor identitas yang meliputi etnis dan agama ini bercampur dengan konflik atas pendistribusian sumber daya seperti, wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja dan seterusnya. Dalam kasus-kasus dimana identitas dan isu distributif dibaurkan, menciptakan peluang kesempatan bagi para oportunist untuk semakin mempertinggi eskalasi konflik. Inilah yang tercermin dari pendapat sebagian responden sebesar 4% yang menyatakan bahwa konflik di lima wilayah ini akibat ulah provokator.

Dapat dikatakan umumnya konflik secara mikro dilatari ketidakpuasan antar perilaku lintas suku, agama, keamanan, birokrasi dalam penguasaan aset dan lapangan pekerjaan. Masyarakat kurang terbimbing dalam keterbukaan dan mencari solusi bersama yang saling mengalah dan saling beruntung. Juga lemah dalam menganalisis provokasi luar. Sehingga kelabilan tersebut menjadi faktor penunggu (*predispose factors*) yang potensial terhadap ledakan konflik.

Adapun penyebab terjadinya konflik, biasanya diawali kasuistik bersifat individual, disharmoni komunikasi kebutuhan. Selanjutnya dimanfaatkan pihak tertentu lewat pengembangan isu-isu esensi sensitif kehidupan etnis dan keagamaan hingga hajat hidup. Masyarakat labil tersebut cepat terprovokasi untuk harapan menang secara duniawi atau mati suci mempertahankan kebenaran. Sentimen etnis, agama dan perspektif, menjadi faktor pelengkap (*precipitating factors*) terwujudnya konflik horizontal dan vertikal.

#### **b). Fenomena dan Dampak Konflik**

Realita konflik di lapangan adalah munculnya kerusuhan, saling hasut-menghasut, caci-maki, menyiksa, mencederai, memperkosa, membunuh secara

sadis atau penuh pertentangan bathin, membakar, merampas hak milik orang lain, mengusir, penghilangan dokumen-dokumen penting, membakar, dll.

Konflik yang berkepanjangan selalu menyisakan ironi dan tragedi. Kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu lama menjadikannya sebagai perilaku yang seolah wajar dan bahkan terinstitusionalisasi. Akibatnya lingkaran setan kekerasan menjadi mata rantai yang semakin sulit untuk diputuskan. Karena perasaan masing-masing pihak adalah *victim* (korban) memicu dendam yang jika ada kesempatan akan dibalaskan melalui jalan kekerasan pula. Belum lagi kerusakan dan kerugian materiil yang harus di tanggung, sungguh tak terperikan lagi. Sebesar 15% responden menyatakan bahwa dampak konflik adalah jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, 11,4 % menyatakan kehilangan pekerjaan, 11,6% menyatakan konflik telah membuat mereka yang tadinya akur dan rukun terpaksa harus saling berkelahi karena perbedaan identitas, bahkan 12,4% menyatakan bahwa perkelahian dan konflik tersebut mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan diantara mereka yang secara kebetulan berbeda identitas etnis atau agama. Kerugian materiil, berupa kerusakan sarana ibadah dan sarana pendidikan masing-masing diutarakan oleh 9,8% dan 7,8% responden.

Dampak terbesar dari konflik yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius, justru adalah pada aspek psiko-sosial masyarakat. Yaitu sebesar 16,7% responden menyatakan konflik telah membuat mereka selalu dihinggapi rasa takut dan merasa selalu tidak aman. Akibatnya, diantara kelompok-kelompok masyarakat timbul rasa saling curiga dan mengikis rasa kepercayaan diantara warga masyarakat (*distrust*), dinyatakan oleh 15% responden.

Dampak konflik lainnya adalah mengundang turun tangan keluarga dan sanak saudara dari kepulauan, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga ibu kota negara datang membantu keluarganya secara ekonomi, tenaga, ikut berperang dll. Di sudut agama terpanggil rasa solidaritas se-agama dari pelbagai organisasi sosial keagamaan dari pelbagai penjurus tanah air hingga dari luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan pula oleh para pencuri, menyaru sebagai penyelamat-pemihak ternyata mejarah milik semua pihak.

Pasca konflik, eksekusi masih berlanjut, perumahan, lembaga pendidikan, perkantoran, sarana ibadah musnah setidaknya hancur, kehilangan harta benda, mata pencaharian dan sanak saudara, orang cacat, putus sekolah, penderita keabnormalan jiwa, saling curiga, hari depan yang suram, pihak keamanan dan birokrasi kehilangan kharisma, dll.

Trauma komunal seperti ini akan menimbulkan luka yang mendalam dan menyakitkan. Trauma komunal ini juga akan melahirkan 'pahlawan' dan 'martir' dari kedua belah pihak yang bertikai, berikutan kenangan akan pengorbanannya yang digunakan untuk memperdalam perpecahan yang nyata diantara kelompok identitas yang berkonflik.

### **c). Cara Penanganan Konflik**

Konflik yang terjadi di lima wilayah Sampit, Sambas, Ambon, Poso dan Ternate, menampilkan interaksi yang rumit antara kekuatan-kekuatan yang berbeda. Namun demikian semua kasus di tiap wilayah mewakili jenis konflik yang mengakar dan berkepanjangan. Karenanya, kesemuanya membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dan institusi yang berbeda pula untuk mengelola pertikaian dan

membangun perdamaian yang berkelanjutan. Lebih jauh, masing-masing membutuhkan penciptaan struktur yang terancang baik yang sengaja ditujukan untuk kebutuhan yang spesifik. Karena itu sesungguhnya, tidak ada "resep manjur" yang dapat diterapkan untuk mengatasi segala jenis konflik.

Di sinilah justru kelemahan dari upaya penanganan yang selama ini sudah dilakukan pemerintah. Dimana pola penanganan konflik di tiap wilayah cenderung "diseragamkan". Hal tersebut terlihat dari respon masyarakat yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah selain memberikan bantuan fisik materiil, seperti sembako, atau tempat penampungan hanya berkisar pada fasilitasi dialog (diutarakan oleh 46,3% responden), penjagaan oleh aparat keamanan (34,4%) dan sosialisasi perdamaian (19,2%).

Upaya-upaya yang lebih menyentuh persoalan yang mendasar dan substansi sebagaimana dikemukakan dalam point cara penanganan konflik, seperti penguatan basis sosial dan ekonomi masyarakat, pengaturan penguasaan sumber daya ekonomi secara lebih adil dan seterusnya belum banyak dilakukan. Akibatnya, pemerintah seringkali terjebak dalam paradigma *menyelesaikan* konflik dan bukannya *mengelola* konflik.

Dalam konteks teori-teori penanganan konflik yang dikemukakan Bloomfield, Ben Rielly, Charles Nupen, Pieter Haris yang telah dikutipkan terdahulu, maka respon masyarakat di lima wilayah konflik terhadap cara penyelesaian konflik yang mereka alami sungguh relevan dengan paradigma penanganan konflik mutakhir itu, dimana sebagian besar responden 73,2% menyatakan agar penyelesaian konflik dilakukan sendiri oleh masyarakat di masing-masing desa dengan melibatkan para tokoh agama, adat, etnis dan berbagai pemuka dan komponen masyarakat yang kompeten. Disusul kemudian 13% menginginkan agar penyelesaian konflik dilakukan di rumah ibadah saja, dengan difasilitasi oleh para pemuka agama. Hanya 7,5% saja yang menginginkan agar konflik diselesaikan di kantor polisi serta 5,7% saja yang menyatakan agar diselesaikan di pengadilan.

Untuk mempercepat proses penanganan konflik tersebut, maka warga masyarakat daerah konflik mengusulkan agar masing-masing pihak bisa lebih mengembangkan sikap saling menghargai, diutarakan oleh 27,6% responden. Selain itu juga harus dikembangkan sikap tenggang rasa (18,5%), bersedia untuk berbaur dan tidak mengelompok secara eksklusif (16,6%), serta mau bergotong (15,5%).

#### **d). Modal Sosial Yang Dimiliki.**

Sebagaimana analisa teoritis terdahulu bahwa untuk mewujudkan pengelolaan konflik yang baik, menurut Yash Ghai, Profesor Hukum Publik Universitas Hongkong ada prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh segenap komponen masyarakat yang bertikai. Yaitu kepemimpinan yang berwawasan kedepan dan keinginan kuat segenap komponen masyarakat untuk menyudahi dan konflik yang terjadi.

Mengacu pada berbagai komponen tersebut, data yang dihimpun peneliti menunjukkan bahwa masyarakat di lima wilayah konflik umumnya masih memiliki modal sosial yang cukup memadai untuk mengelola konflik mereka. Karena umumnya mereka, 16,9 % menganggap perlunya saling pengertian, 14,5% menyatakan agar masing-masing kelompok etnis/agama harus saling menghormati, 8,8% memandang saling menolong masih menjadi modal sosial yang dimiliki.

Data-data tersebut diperkuat oleh berbagai sikap masyarakat yang mencerminkan keterbukaan dan kesediaan mereka untuk lebih erat melakukan interaksi sosial dan budaya. Dalam masalah perkawinan antar suku (termasuk suku yang bertikai) misalnya, 83,8% menyatakan setuju. Demikian juga dalam hal penataan rumah antar warga yang bertikai, umumnya (72,1%) tidak menyetujui jika dipisahkan secara diametral sesuai dengan suku/agama masing-masing, karena hal tersebut justru akan semakin memperdalam jurang perbedaan diantara mereka. Demikian pula halnya dengan penyediaan sekolah khusus untuk penganut agama/suku tertentu, sebanyak 67,9% menyatakan keberatannya. Intinya, mereka sesungguhnya tidak pernah menginginkan terjadinya pemisahan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik (umum).

Bagi sebahagian besar penduduk asli dan pendatang masih menunjukkan kemauan hidup bersama secara damai seperti semula. Memiliki renungan yang relatif sama, mengapa bisa terbawa arus saling bermusuhan dan berperang sesama se kampung yang sebelumnya bergandengan tangan dalam menjalankan kehidupan sekalipun berbeda etnis dan agama serta berlebih kurang tingkat rezeki.

Analisa cerdas warga juga muncul “kita telah saling berperang apa yang telah kita peroleh dengan peperangan itu?. Sesungguhnya siapa yang menghipnotis sehingga kita saling bermusuhan dan berperang?. Menang jadi arang, kalah jadi abu dan nyatanya semua kalah serta rugi”.

Berarti ada modal dari segi kesadaran *kohesi* sosial, membenci orang atau kelompok yang telah memprovokasi (*menghindari konflik* baru), dan implisit keinginan membangun *tatanan sosial baru* dari puing keruntuhan.

Dengan sikap yang sedemikian sesungguhnya dapat dikatakan bahwa masyarakat di wilayah konflik umumnya masih memiliki modal sosial yang cukup memadai untuk dapat menyatukan mereka kembali dalam kehidupan yang guyub dan rukun. Khususnya Ambon, Ternate dan Poso, sementara Sambas dan Sampit masih trauma dengan interaksi lintas etnis yang tidak persuasif.

#### **e). Tipe Perubahan yang Diinginkan Masyarakat**

Nampaknya masyarakat menginginkan keikutsertaan mereka dalam rancang bangun kehidupan mereka kembali. Baik itu lintas etnis, agama maupun stratifikasi sosial. Dengan demikian keterbukaan secara horizontal dan saling mempertimbangkan secara vertikal antara konsep *top down* dengan *bottom up* tidak sekedar di dalam kajian retorika akademis tapi menjadi landasan riil program.

## **2. Hubungan Gejala-gejala Konflik dan Kedamaian**

Dari berbagai faktor dan variabel yang dapat dilihat kaitannya satu sama lain dari pemikiran masyarakat yang muncul terkait dengan gejala-gejala konflik dan kedamaian dalam penelitian ini terlihat sbb:

- a). Masyarakat dari pelbagai jenis agama, jenjang pendidikan, ragam suku bangsa/etnis, variasi pekerjaan, jenjang umur di desa rusuh dan aman, umumnya tidak setuju penataan rumah dilakukan berdasarkan jenis agama maupun kesamaan suku bangsa. Biarlah berbaur secara alamiah saja. Adapun perkawinan antar suku tidak perlu dipermasalahkan namun perkawinan antar agama sebaiknya tidak terjadi. Pada dimensi kehidupan lainnya masyarakat kebanyakan tidak setuju jika penguasaan peluang kerja didominasi kelompok mayoritas maupun minoritas tertentu. Mereka umumnya tidak setuju diadakannya sekolah khusus untuk

- suku/agama tertentu. Mayoritas menyatakan jaminan pemeliharaan keamanan kelompok mayoritas maupun minoritas di masing-masing desa.
- b). Sekalipun umumnya menunjukkan porsi setuju atau tidak setuju pada berbagai pilihan sikap itu, namun oposisi atau lawannya masing-masing merupakan porsi-porsi yang cukup besar juga yang secara kualitatif patut dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Misalnya, Umumnya tidak setuju penataan rumah berdasarkan agama/suku itu mencapai 291 responden (76,2%) akan tetapi yang setuju mencapai 91 responden (23,8%), dst.
  - c). Dalam tabel statistik sekalipun terlihat ada angka yang menunjukkan signifikansi tinggi dan rendah pada hubungan variabel-variabel, tetapi kurang reliabel karena penyebaran frekuensi terlalu melebar sehingga banyak yang menjadi bias. Itulah sebabnya ke dua perhitungan di atas lebih didasarkan kepada angka absolut dan prosentase saja untuk mempermudah pengamatan dan analisa sesuai realitas data.
- Dengan demikian menggambarkan kemauan untuk hidup bersama dengan segala penghargaan yang mesti dilakukan dalam sisi-sisi perbedaan norma dan nilai, nuansanya masih sangat kental untuk direspon di samping yang ingin pisah masih butuh antisipasi persuasif yang serius.

### **3. Substansi Hubungan Pelbagai Faktor**

Sebahagian yang menginginkan pemilahan dalam berbagai hal disebabkan karena trauma yang mereka alami langsung saat kerusuhan terjadi. Namun ada pula yang melihatnya dari segi keuntungan strategi kelompoknya karena mereka berada pada posisi yang mayoritas.

Sementara bagi yang tidak menginginkan pemilahan pelbagai komponen kehidupan disebabkan karena pemikiran mereka bening untuk hidup pada masa yang akan datang dalam keutuhan yang lebih permanen. Juga karena mereka selama ini merasa sadar sebagai orang-orang yang hanya terprovokasi disamping mereka yang kurang langsung terlibat dalam medan kerusuhan.

Sebahagian yang menginginkan rekayasa pembauran dalam berbagai aspek kehidupan dilatari pertimbangan upaya itu bisa memperkecil sumber perpecahan. Namun sebahagian yang menginginkan tidak adanya rekayasa agar kedamaian itu terjadi secara proses alami, sehingga lebih permanen karena didasarkan tanggungjawab atas pilihan masing-masing.

### **4. Kritik Teoritis**

#### **a). Ketepatan hipotesis**

Hipotesis yang dinyatakan yaitu *“Kerusuhan di berbagai kawasan di wilayah tanah air dalam persepsi berbagai kalangan etnis dan agama berhubungan dengan kesenjangan sosial ekonomi, sosial keagamaan, perilaku antar etnis, tidak maksimalnya memerankan lembaga pelayanan sosial pemerintah, campur tangan aparat pemerintah dengan pihak keamanan yang memihak dalam penyelesaian masalah-masalah kehidupan dalam masyarakat dan di sisi lain keikutsertaannya dalam memicu kerusuhan itu sendiri.*

*Karena komponen etnis dan agama merupakan faktor-faktor substantif dalam kehidupan, maka kedua komponen tersebut dikemas sebagai pemicu konflik hingga melahirkan kerusuhan.”*

Berdasarkan temuan lapangan umumnya terbukti. Kerusuhan Sambas dan sampit dinyatakan lebih pada perilaku salah satu etnis pendatang yang kurang bisa

menyesuaikan diri (*adjustment*) terhadap budaya dominan dalam keseharian maupun dalam upaya pemilikan (Hasil wawancara dan lihat juga Bruner dalam Suparlan). Kerusuhan Ambon, Ternate dan Poso lebih pada persaingan peluang menguasai pasar. Sambas dan Sampit tentang pemilikan lahan pertanian, perkebunan serta bisnis di satu sisi, keinginan untuk mensiasati kekuatan sesuatu agama di sisi lain, perebutan kekuasaan eksekutif di satu dimensi.

Keterlambatan koordinasi dan penghimpunan pelbagai sumberdaya oleh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan hankam dalam mencegah perluasan konflik, menengarai kerusuhan yang sedang terjadi serta mengatasi dampak kerusuhan dari konflik. Terjadinya pemihakan aparat pemerintah dan keamanan yang se-kerabat, se-etnis dan se-agama dengan pihak-pihak yang bertikai. Termasuk upaya sebahagian aparat keamanan melakukan tindakan anarkis yang semakin memicu kerusuhan lintas etnis dan agama. Tidak kurang pentingnya adalah adanya data yang menunjukkan upaya orang-orang tertentu melalui komunikasi di tempat-tempat tertentu (kedai kopi, pasar, pertandangan, berbagai kesempatan pertemuan) meyakinkan rakyat bahwa masa rezim Orde Baru adalah pemerintahan yang sangat baik dan fase reformasi adalah pemerintahan yang kacau.

Di sisi lain nampaknya konflik yang berdampak kerusuhan ini merupakan bahagian dari skenario konspirasi besar pihak-pihak luar negeri untuk menghancurkan tatanan bangsa ini dari segi keutuhan (kohesi), stabilitas ekonomi dan pembenturan rakyat dengan TNI-Birokrasi. Ini terlihat juga dari jel-jel yang dielu-elukan pihak-pihak yang berkonflik khususnya di Ambon, Ternate dan Poso a.l. Hidup Amerika!, Hidup Australia!, Hidup Belanda!.

#### **b). Teori Temuan**

Teori fungsional dari Talcott Parson yang mengatakan: “...*Tertib sosial akan dapat terbentuk, untuk mencegah terjadinya pertikaian antara warga-warga dari suatu masyarakat...terletak pada hubungan timbal-balik antara sistem-sistem kebudayaan, sosial dan kepribadian. Hal itu mengakibatkan terjadinya pelembagaan dari nilai-nilai budaya dalam norma-norma serta aturan-aturan dari sistem sosial tersebut. Warga masyarakat dengan mudah patuh, oleh karena aturan-aturan yang ada adalah serasi dengan nilai-nilai yang dianutnya. ....Apabila nilai-nilai yang dianut membentuk norma-norma sosial dan kepribadian orang, maka masyarakat akan berada dalam keadaan stabil oleh karena hampir-hampir tidak terjadi pertikaian atau konflik*”.Demikian sebaliknya.

Teori tersebut berlaku karena konflik yang terjadi selama ini karena longgarnya ikatan ketiga sistem ini.

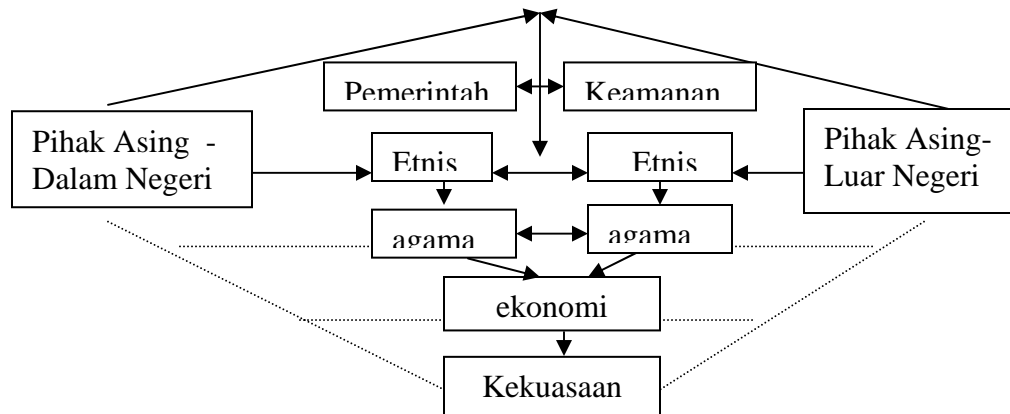
Ada 4 komponen yang sudah longgar di wilayah rusuh : (1). Nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing warga etnis, tidak proporsional memasuki kebudayaan; (2). Status dan hak pribadi tidak terjamin; (3). Prestise dijatuhkan; (4). Pemilikan dan pencaharian tidak terjamin. (Lihat Parson dalam Sukanto, 1986: 48).

Teori integrasi beresensi kohesi sosial tidak terjamin di lapangan penelitian karena: *pertama*, tidak diupayakan proporsi yang cukup dari setiap komponen aktor-aktor bisa bertindak sesuai dengan syarat-syarat keutuhan; *kedua*, Pemberian pola-pola kebudayaan yang salah satunya gagal dalam menemukan suatu tata tertib yang minimal dan dengan permisif itu menimbulkan penyimpangan dan pertentangan

Teori Malinowski tentang konflik akan terjadi jika dari berbagai pihak yang dipertemukan dalam satu wilayah kehidupan tidak dilandasi secara kuat oleh keuntungan timbal balik “*reciprocity*” dibawah prinsip-prinsip legal. (Lihat Coser and Rosenberg, 1976: 61 dan 172). Dari temuan menunjukkan kebenaran ini, karena prinsip reciprositas dan legalitas hampir tidak jelas fungsinya.

Model Kebudayaan Dominan yang dikembangkan Edwar Bruner dan digunakan Parsudi Suparlan menganalisis kasus-kasus Bandung, Ambon dan Sambas. Dinyatakannya: “*Adanya perbedaan dalam strategi beradaptasi orang Jawa di Bandung dengan strategi adaptasi orang Buton, Bugis dan Makassar (BBM) di Ambon, serta orang Madura di Sambas memperlihatkan mengapa konflik-konflik dapat muncul di kedua daerah terakhir. Dengan kata lain, aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang bersumber pada kebudayaan dominan masyarakat setempat tidak diikuti oleh para pendatang dari Buton, Bugis, Makassar dan Madura*” (Redaksi Jurnal Antropologi Indonesia, 58: 1999: iv). Teori ini juga menunjukkan kebenarannya.

Berarti proposisi yang diiringi premis-premis pendukung teori Talcott Parson, Malinowski serta Edwar Bruner yang diperkuat Parsudi Suparlan, terbukti di wilayah penelitian sekalipun proporsinya tidak terlalu berimbang untuk setiap wilayah. Akan tetapi kelemahan teori-teori ini seolah-olah memperlihatkan kedinamisan ide dan aktivitas masing-masing etnis dan agama di masing-masing lokal saja secara horizontal dan vertikal yang menyulut konflik. Padahal di seluruh wilayah penelitian keadaan itu hanya bersifat laten dan labil. Sementara yang berperan adalah pihak provokasi politisi yang menyentuh wilayah pemerintahan dan keamanan, pihak luar baik masih dari dalam negeri maupun pihak asing. Jika diskemakan model teori temuan di lapangan adalah sbb:



“Menebalnya kelabilan dan kelatengan berbagai hal dalam lintas etnis, agama dan pelapisan sosial, mempercepat keterlibatan mereka dalam konflik jika pihak berkepentingan mengkemas kondisi itu dengan janji kemakmuran, kemenangan hingga atau kesakralan religi.”

##### 5. Perspektif Kedamaian Pada Wilayah yang Pernah Rusuh

Dengan demikian kedamaian sosial akan masih memungkinkan dicapai sebagai resolusi konflik jika diadakan pertemuan-pertemuan intensif lintas etnis, antar agama, pelapisan sosial dan profesi dalam satu kampung sehingga keutuhan

itu semakin terjaga. Ini khususnya Poso, Ambon dan Ternate. Namun demikian untuk wilayah Sambas dan Sampit masih belum bisa diprediksi karena etnis-etnis yang bertikai tidak lagi pada wilayah pembauran dan umumnya belum kelihatan kemauan (*willingness*) dua belah pihak untuk bersama. Namun demikian jika ratifikasi konsep kedamaian para pihak yang bertikai disosialisasi oleh pemerintah serta pihak keamanan serta diiringi bantuan, pembimbingan ke arah perubahan pola interaksi dan upaya pemilikan, pengawasan dan pelaksanaan sanksi hukum secara tegas terhadap oknum, kelompok, atau lembaga penyulut kerusuhan baru, akan memungkinkan terciptanya kerukunan hidup baru.

Konflik baru yang sangat rentan jika muncul kehidupan bersama, lebih rentan pada masyarakat dayak, melayu dengan madura di wilayah sambas dan sampit karena mempertemukan jiwa tempramental di satu sisi dan jiwa frustrasi dan stress di sudut lain. Kerentanan kedamaian akan cepat terusik di Ambon, Ternate dan Poso jika esensi agama diusik oleh penyulut.

Kewibawaan pemerintah dan pihak keamanan akan lama pulih jika setiap adanya kerusuhan lambat atau mengurangi bantuan yang diprogramkan untuk mereka atau ditemukan tindakan kasar atau keberpihakan mereka dalam kemelut masyarakat itu.

## **D. P e n u t u p**

### **1. Kesimpulan**

Konflik yang terjadi yang berwujud wilayah rusuh di Indonesia merupakan akumulasi dari kerapuhan persatuan dan kesatuan warga masyarakat heterogen dalam satuan-satuan wilayah kebudayaan dengan kepentingan konspirasi kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri serta pihak asing. Kepentingan itu dilaterbelakangi tujuan politik, ekonomi dan agama.

Upaya itu tidak mencapai sasaran puncak karena ditingkat elit dan pelaksana pihak keamanan dan birokrasi mayoritas masih komit dengan negara kesatuan sehingga serius memperkecil zona konflik dan kefatalan pelbagai dampaknya. Masyarakat dari berbagai suku dan agama juga tidak memiliki basic yang kuat memasuki kancah konflik bahkan sebaliknya dari semula sudah terbiasa hidup rukun dan damai dalam pelbagai perbedaan.

Namun begitu karena masyarakat telah semakin berpendidikan dan cerdas, ditambah dengan nuansa reformasi secara mencuatnya konsep HAM, mereka menginginkan agar pelbagai pihak yang terkait dengan pembangunan kehidupan mereka, seyogyanya mengikutsertakannya dalam merancang program itu sehingga sesuai sasaran.

### **2. Rekomendasi**

Perlu upaya serius mematangkan pelbagai kalangan dalam berpolitik di Indonesia. Sejalan dengan itu harus diperkuat jajaran Departemen Luar Negeri kita agar strategis dan taktis memahami campurtangan asing terhadap kondisi bangsa kita dan mengkordinasikannya kepada pihak terkait.

Semua pihak menanamkan idealisme bermasyarakat dan bernegara dalam menjalankan tugas agar tidak terkesan lambat atau menanggung di air keruh, mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Kelabilan dalam menerima informasi yang masih terdapat dalam masyarakat kita agar segera mendapatkan paket-paket program pendidikan, bimbingan dan penyuluhan sehingga tidak mudah tersugesti seperti yang telah terjadi.

Dalam pelbagai kegiatan pembangunan masyarakat hendaknya mengikutsertakan partisipasi masyarakat bukan sebagai objek tapi juga sebagai sebahagian dari subjek pembangunan itu sendiri, khususnya pasca kerusuhan. Sementara di lokasi damai diperkuat ikatan kebersamaan melalui program penguatan jaringan ekonomi, sosial dan keamanan.

## DAFTAR RUJUKAN

Azyumardi Azra (Editor)

1998 *Agama Dalam Keragaman Etnik Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI.

Achmadi Jayaputra dan Setyo Sumarno

2000 *Permasalahan Sosial Korban Kerusuhan Di Propinsi Sumawesi Tenggara*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional

Bellah, Robert N. (Editor)

1965 *Religion and Progress In Modern Asia*. New York: The Free Press.

Bohm, RP. C.J. Fatlolon, Dkn Costan, Fr. Pr (Ed.)

2002 *Lintasan Peristiwa Kerusuhan Maluku tahun 1999-2002*, Ambon: Keuskupan Amboina.

Coser, Lewis A. and Rosenberg, Bernard

1976 *Sociological Theory* (Fourth Edition). USA: Macmillan Publishing Co., Inc.

Chambers, Robert

1983 *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman Inc.

Dahrendorf, Ralf

1986 *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri (Sebuah Analisa Kritik)*. Terjemahan Ali Mandan dari judul aslinya: *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali

Depsos RI

1995 *Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Terbitan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Depsos RI.

Effendi Johan, dkk.

- 1999 *Sistem Siaga Dini (Untuk Kerusuhan Sosial)*. Jakarta: Terbitan Balitbang Agama Depag RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta
- 
- 1999 *Tradisi dan Kepercayaan Lokal Pada Beberapa Suku Di Indonesia*. Jakarta: Terbitan Balitbang Agama Depag RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta
- Germani, Gino (Editor)  
1973 *Modernization, Urbanization, and the Urban Crisis*. Boston: Little, Brown and Company
- Hadikusuma, H. Hilman  
1893 *Antropologi Agama (Bagian I: Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu, di Indonesia)*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- YIII: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial  
1992 *Dari Otonomi Ke Disintegrasi*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia
- Kastor, Rustam  
2000 *Damai Sekarang atau Perang Berlanjut*. Ambon: Forum Pembela Keadilan Maluku (Terbitan Kalangan Sendiri).
- Ketetapan-Ketetapan MPR  
1999 *9 Ketetapan MPR dilengkapi dengan Susunan Lengkap Anggota Kabinet Persatuan Nasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Lessa, William A. and Vogt, Evon Z.  
tt *Reader In Comparative Religion*. New York: Harper & Row, Publishers
- Mattulada, H.A.  
1999 *Kesukubangsaan dan Negara Kebangsaan di Indonesia: Prospek Budaya Politik Abad ke-21*. Jakarta: ( Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXIII, No. 58 Januari-April 1999).
- Parsons, Talcott,  
1986 *Fungsionalisme Imperatif (Ringkasan Soerjono Soekanto)*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali
- 
- 1964 *The Social System (The Mayor Exposition of the Author's Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System)*. New Yor: The Free Press Paperback
- Rahawarin, M. Nasir

2000 *Konflik Maluku dan Solusinya*. Ambon (Tulisan Tanpa Diterbitkan).

Rusmin Tumanggor, Dkk

2000 *Kerukunan Hidup Dalam Konsepsi Berbagai Etnis Di DKI Jakarta*. Jakarta: Hasil Penelitian LEMLIT IAIN Syahid Kerjasama dengan Bakor Bappeda DKI Jakarta..

Scokpitti, Frank R.,

1980 *Social Problem*, New York: University of Delaware,

Soedijar, Ahmad, ZA

2002 *Bencana Sosial Sampit*. Jakarta: Terbitan Balatbangsos Depsos RI

Soekanto, Soerjono

1983 *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali

Suparlan, Parsudi

1999 *Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan*. Jakarta: (Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXIII, No. 58 Januari-April 1999).

Biodata Penulis :

1. Rusmin Tumanggor, menamatkan S1 di IAIN Ar Raniry Banda Aceh pada jurusan Pedagogi Fakultas Tarbiyah. Gelar Magister dan Doktor diperoleh di Universitas Indonesia dengan spesialisasi Antropologi Kesehatan. Pernah bekerja di LIPI sebagai peneliti sejak 1993-1997, staf khusus Ditbinpasis Ditjen Binbaga Islam Depag RI, 1999-2002, Konsultan Antropologi Pendidikan dari Menengah Umum Depdiknas RI, 1999-2001, Dosen tetap pada IAIN Jakarta, 1998–sekarang.
2. Jaenal Aripin, M.Ad, adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum, juga peneliti pada lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak tahun 2001, bersama Prof.DR. Rusmin Tumanggor, MA menjadi konsultan tetap proyek penelitian di Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag Agama RI.
3. Imam Soeyoeti, meraih gelar Sarjana Sosial Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta tahun 2002. Saat ini bekerja sebagai peneliti pada lembaga penelitian UIN Jakarta serta aktif di